

DISTRIBUSI LPG 3 KG TEPAT SASARAN DALAM MENGURANGI BEBAN SUBSIDI

Edmira Rivani

19

Abstrak

Pemerintah akan terus mewaspadaai kemungkinan terjadinya pembengkakan subsidi LPG 3 kg, seiring pengalaman realisasi 2 tahun terakhir yang selalu membengkak dari kuota. Kemungkinan pembengkakan subsidi LPG terutama karena kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan lonjakan konsumsi. Konsumsi LPG 3 kg selalu meningkat karena pada praktiknya, distribusi tabung gas LPG sangat terbuka, sehingga, golongan masyarakat yang seharusnya tidak berhak menikmatinya, tetap bisa membeli. Tulisan mengkaji upaya pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg dengan tepat sasaran guna mengurangi beban subsidi. Pemerintah memastikan akan mendistribusikan gas LPG 3 kg pada 2020 mendatang dengan menerapkan distribusi tertutup, selain juga jaringan gas akan dibangun. Dengan rilis data penurunan kemiskinan, seharusnya subsidi LPG juga akan turun. Terkait kebijakan pengurangan subsidi LPG ini, melalui fungsi pengawasan, DPR RI khususnya komisi VII perlu memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan agar penyaluran subsidi LPG lebih tepat sasaran.

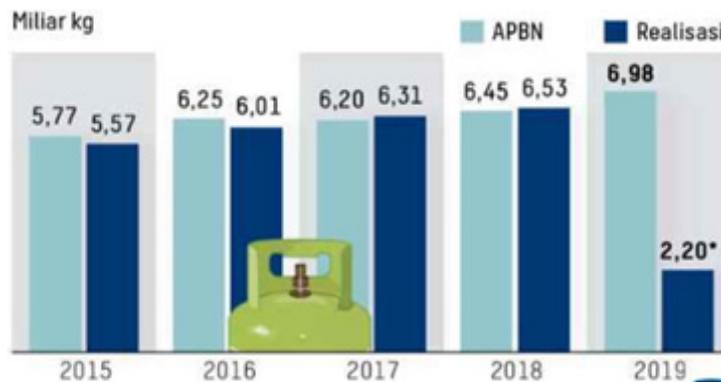
Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, subsidi energi menjadi salah satu beban fiskal yang signifikan bagi Pemerintah Indonesia. Pemerintah menyatakan akan terus mewaspadaai kemungkinan terjadinya pembengkakan subsidi *Liquified Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram (kg), seiring pengalaman realisasi 2 tahun terakhir yang selalu membengkak dari kuota. Realisasi belanja subsidi bahan bakar minyak dan LPG, sampai dengan Mei 2019, sebesar Rp23,5 triliun atau 23,4% dari total

pagu Rp100,6 triliun (Kompas, 27 Juni 2019). Kemungkinan pembengkakan subsidi LPG terutama karena kenaikan harga minyak dunia, pelemahan nilai tukar rupiah, dan lonjakan konsumsi. Realisasi konsumsi LPG tabung 3 kg selama 2015-2018 cenderung mendekati kuota, namun pada dua tahun terakhir (tahun 2017 dan 2018) sedikit melampaui kuota (Gambar 1).

Tahun lalu, realisasi konsumsi LPG sebesar Rp6,53 miliar kg, lebih tinggi dari pagunya (6,45 miliar kg). Sementara





Gambar 1. Volume Konsumsi LPG Tabung 3 Kg

realisasi konsumsi pada tahun 2017 sebesar 6,31 miliar kg dari pagu 6,2 miliar kg. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, konsumsi LPG 3 kg selalu meningkat karena pada praktiknya distribusi tabung gas LPG sangat terbuka, sehingga, golongan masyarakat yang seharusnya tidak berhak menikmatinya, tetap bisa membeli (liputan6.com, 25 Juni 2019). Jika hal ini terus berlanjut, dikhawatirkan semakin meningkatkan kesenjangan (rasio gini). Selain itu, dengan mengimplementasikan system terbuka juga memunculkan potensi terjadinya pengoplosan dan penimbunan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengurangi beban subsidi dengan mendistribusikan LPG 3 kg tepat sasaran. Tulisan ini mengkaji upaya pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kg dengan tepat sasaran guna mengurangi beban subsidi.

Tujuan dan Kelompok Sasaran Subsidi LPG 3 Kg

LPG 3 kg mulai dikenal oleh masyarakat ketika pemerintah

melakukan kebijakan melalui program konversi dari minyak tanah ke LPG, konversi tersebut dilakukan untuk mengantisipasi harga minyak dunia yang semakin meningkat dan stok minyak mentah yang semakin sedikit. Kemudian PT. Pertamina (Persero) mengeluarkan produk dengan varian kemasan baru berupa LPG (tabung) 3 kg, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah beralihke LPG tabung 3 kg. Pendistribusian LPG tabung 3 kg diawali dengan memberikan secara gratis kompor gas beserta peralatan lainnya kepada rumah tangga dan usaha mikro.

Tujuan pemberian subsidi LPG 3 kg tidak terlepas dari tujuan awal konversi minyak tanah ke LPG 3 kg, yaitu melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM), melakukan efisiensi anggaran pemerintah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi, dan menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien. Sementara, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.

104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG tabung 3 kg, maka penerima subsidi adalah: (i) rumah tangga dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah murni, serta merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan dari kelurahan setempat; (ii) usaha mikro dengan persyaratan dan kriteria yaitu pengguna minyak tanah untuk bahan bakar memasak dalam usahanya, merupakan penduduk legal setempat yang dibuktikan dengan melampirkan *foto copy* KTP dan KK atau surat keterangan dari kelurahan setempat, serta melampirkan surat keterangan usaha dari kelurahan setempat.

Pengendalian Konsumsi dengan Distribusi Tertutup

Tujuan dan kelompok sasaran subsidi LPG 3 kg pada penjelasan sebelumnya, berbeda dengan praktik distribusi tabung gas LPG yang sangat terbuka. Diperlukan langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dengan membenahi mekanisme pendistribusian, dari terbuka menjadi tertutup, diiringi dengan upaya pengawasan dan pengendalian konsumsi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pemerintah memastikan akan mendistribusikan gas LPG 3 kg pada tahun 2020 dengan menerapkan distribusi tertutup. Hal tersebut dilakukan dengan cara menyalurkan LPG 3 kg kepada golongan masyarakat tidak mampu dengan menggunakan kartu identitas tertentu. (sindonews.com, 23 Juni

2019).

Pelaksanaan distribusi gas LPG 3 kg tertutup merupakan perubahan mekanisme, yaitu subsidi diberikan berdasarkan kartu identitas tertentu. Adapun nominal uang subsidi diberikan kepada masyarakat kategori tidak mampu melalui uang elektronik yang dimasukkan ke kartu identitas penerima. Kemudian, jumlah nominal uang subsidi akan diisi saldo dengan besaran nominal yang ditentukan pemerintah. Tujuan penerapan distribusi LPG 3 kg tertutup agar tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Adapun penerima subsidi akan disesuaikan dengan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Penerapannya akan dilakukan bertahap. Untuk pelaksanaannya dilakukan di Jabodetabek, selanjutnya bertahap ke kota lain.

Persoalan yang dihadapi saat ini adalah acuan verifikasi data yang digunakan untuk mendata masyarakat miskin tidak jelas sehingga membingungkan. Padahal akurasi data itu penting agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan hanya dikonsumsi oleh masyarakat miskin. Permasalahan data tersebut terlihat dari lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Dinas Sosial, dan lain-lain memiliki jumlah atau kriteria masyarakat miskin yang berbeda-beda. Tentu jika acuan yang digunakan pemerintah tidak jelas, maka akan menyulitkan distribusi di lapangan. Pemerintah perlu mengevaluasi terlebih dahulu basis data yang digunakan

untuk memberikan subsidi kepada masyarakat sehingga validitasnya terukur dengan tepat. Jika tidak terverifikasi dengan tepat, dikhawatirkan justru akan menambah beban masyarakat miskin. Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Migas), Erry Purnomohadi, berharap pelaksanaan pola distribusi tertutup segera diterapkan mengikuti India dan Meksiko. Hal itu supaya pendistribusian gas LPG 3 kg tepat sasaran, selain itu distribusi tertutup dapat dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi terlebih dahulu karena jumlah penduduknya 10% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Jika uji coba dan pelaksanaan distribusi tertutup sukses di Jabodetabek, daerah lain bisa mengikuti. (okezone.com, 24 Juni 2019).

Setelah distribusi tertutup dijalankan, gas LPG 3 kg dapat dijual sesuai harga pasar, di mana subsidi LPG 3 kg tetap diberikan kepada yang berhak, sedangkan yang tidak berhak tetap dapat membeli LPG 3 kg yang sesuai dengan harga pasar.

Perluasan Jaringan Gas (Kompor Listrik) Tekan Subsidi LPG

Perluasan pembangunan jaringan gas bumi di berbagai daerah di Indonesia merupakan salah satu solusi untuk menekan membengkaknya konsumsi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran sebagaimana dijelaskan di atas. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran

pembangunan jaringan gas (jargas) pada 2020 sebesar Rp3,52 triliun. Usulan tersebut melonjak 4 kali lipat dari pagu tahun ini sebesar Rp852,48 miliar (kontan.co.id, 23 Juni 2019).

Seiring peningkatan anggaran, target pembangunan jargas tahun depan juga melesat dari 78.216 sambungan rumah tangga (SR) di 17 kota/kabupaten menjadi 293.533 SR di 53 kota/kabupaten. Rencananya penyediaannya akan terbagi menjadi 14 paket. Direktur Jenderal Migas Djoko Siswanto mengungkapkan, pembangunan jargas merupakan salah satu cara pemerintah untuk memberikan subsidi terhadap penyediaan gas melalui pembangunan infrastruktur. Jika LPG disubsidi setiap tahun, maka jargas cukup sekali saja dibangun. Dengan asumsi satu rumah tangga mengkonsumsi 2 tabung LPG 3 kg per bulan, pembangunan jargas tahun depan bisa menghemat konsumsi LPG sebanyak 21,13 ribu Metrik Ton (MT).

Meski gas yang disalurkan melalui jargas tidak mendapatkan subsidi, namun harganya lebih murah dibandingkan LPG. Misalnya, di beberapa kota, untuk Rumah Tangga (RT) dan Pelanggan Kecil (PK) menengah ke bawah sebesar Rp4.250 per meter kubik lebih murah dari pada harga pasar gas LPG 3 kg yang berkisar Rp5.013 sampai dengan Rp6.266 per meter kubik. Sedangkan untuk RT dan PK menengah ke atas sebesar Rp6.250 lebih murah daripada harga pasar gas LPG 12 kg yang berkisar Rp9.085 sampai dengan Rp11.278 per meter kubik. Usulan anggaran ini sendiri masih

harus dibahas dengan Komisi VII sebelum ditetapkan sebagai pagu anggaran tahun depan. Sebagai informasi, BPH Migas mencatat pembangunan jargas hingga 2018 telah mencapai 325.852 sambungan rumah tangga (SR) yang tersebar di 40 kota/kabupaten. Pemerintah menargetkan pembangunan jargas bisa mencapai 4,7 juta SR pada 2025 (cnnindonesia.com, 21 Juni 2019).

Penutup

Biaya subsidi akan menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dan cenderung membebani belanja pembangunan. Walaupun, secara luas dipandang sebagai sejenis bantuan sosial, kebanyakan subsidi energi Indonesia bersifat regresif, dengan kata lain hanya menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi secara tidak proporsional, sebagai akibat subsidi tidak tepat sasaran yang tidak menjangkau kalangan miskin. Melalui implementasi distribusi LPG 3 kg tertutup, maka penyaluran subsidi akan tepat sasaran bagi masyarakat tidak mampu. Adapun penerima subsidi akan disesuaikan dengan data TNP2K. Dengan rilis data penurunan kemiskinan, seharusnya subsidi LPG juga akan turun. Selain itu, dalam menekan subsidi LPG pemerintah juga melakukan perluasan pembangunan jargas di berbagai daerah di Indonesia, yang merupakan pemberian subsidi terhadap penyediaan gas melalui pembangunan infrastruktur.

Melalui fungsi legislasi, DPR RI khususnya Komisi VII dapat membuat Undang-Undang baru atau merevisi Undang-Undang tentang Distribusi Tertutup LPG

dan pengawasannya. Sementara dari fungsi pengawasan, DPR RI perlu memberikan masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan agar penyaluran subsidi LPG lebih tepat sasaran.

Referensi

- "Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Dilakukan Bertahap Mulai 2020", 23 Juni 2019, <https://ekbis.sindonews.com/read/1414085/34/distribusi-tertutup-elpiji-3-kg-dilakukan-bertahap-mulai-2020-1561298371>, diakses 27 Juni 2019.
- "Jaringan Gas 293.533 Rumah Tangga Tersambung pada 2020", 21 Juni 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190620194302-85-405104/jaringan-gas-293533-rumah-tangga-tersambung-pada-2020>, diakses 27 Juni 2019.
- "Mulai 2020, Distribusi Gas Elpiji 3 Kg Dilakukan Tertutup", 24 Juni 2019, <https://economy.okezone.com/ad/2019/06/24/320/2070045/mulai-2020-distribusi-gas-elpiji-3-kg-dilakukan-tertutup>, diakses 26 Juni 2019.
- "Pemerintah Waspada Lonjakan Subsidi", Kompas, 27 Juni 2019, hal. 13.
- "Pemerintah Waspada Subsidi Elpiji 3 Kg Membengkak Pada 2020", 25 Juni 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3998010/pemerintah-waspada-subsidi-elpiji-3-kg-membengkak-pada-2020>, diakses 26 Juni 2019.

Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kg.

“Tahun 2020, ESDM Usulkan Anggaran Rp3,52 Triliun Untuk Bangun 293.533 Jargas”, 23 Juni 2019, <https://industri.kontan.co.id/news/tahun-2020-esdm-usulkan-anggaran-rp-352-triliun-untuk-bangun-293533-jargas>, diakses 27 Juni 2019.



Edmira Rivani
edmira.rivani@dpr.go.id.

Edmira Rivani, S.Si, M.Stat. menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran kebijakan ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: *Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014)*, *Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area (2015)*, *Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015)*,

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.